



|             |                                       |              |  |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Media Title | Republika                             |              |  |
| Head Line   | Infrastruktur Butuh Alternatif Kredit |              |  |
| Date        | 1 November 2013                       | Color        |  |
| Section     | News                                  | Circulation  |  |
| Page No     | 14                                    | Article Size |  |
| Journalist  | Muhammad Iqbal                        | Advalue      |  |
| Frequency   | Daily                                 | PR Value     |  |

# Infrastruktur Butuh Alternatif Kredit

■ Muhammad Iqbal

JAKARTA — Pembiayaan yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Managing Director PT Nusantara Infrastructure Tbk Danni Hasan mengatakan, pembangunan infrastruktur di mata perbankan dalam negeri tidaklah menarik mengingat lamanya rentang waktu yang dibutuhkan.

"Bank lebih fokus ke jangka pendek. Padahal, infrastruktur lebih dari itu (rentang waktunya—Red)," ujar Danni dalam konferensi pers Infrastructure Leaders Forum 2013 di Jakarta, Kamis (31/10).

Minimalnya minat perbankan, kata Danni, tak lepas dari minimnya kepastian sebuah proyek infrastruktur. Misalnya, dari sisi ketersediaan lahan.

Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum, minat perbankan dalam negeri meningkat.

"Misalnya, untuk proyek jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Cikampek-Palimanan," kata Danni seraya menyebut belum adanya perbankan asing yang memberikan pembiayaan untuk infrastruktur.

Danni melanjutkan, ketergantungan kepada perbankan tidaklah mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Diperlukan pembiayaan yang baru, bentuknya bisa dari swasta dan nonswasta, seperti dana pensiun. Masalahnya, dana pensiun hanya bisa disalurkan untuk investasi dengan rating AAA. Sedangkan, proyek infrastruktur rata-rata belum bisa *grade* AAA.

Sebenarnya, Danni melanjutkan, terdapat sejumlah solusi pembiayaan yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, obligasi atau surat utang.

Di sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan Malaysia, obligasi telah digunakan untuk membiayai infrastruktur. Keberhasilan kedua

negara tak lepas dari tingginya pertumbuhan volume obligasi dalam 10 tahun terakhir. Contoh lainnya adalah penggunaan sukuk (obligasi syariah) yang baru-baru ini diterbitkan oleh negara-negara Afrika, seperti Nigeria.

Direktur PT Nusantara Infrastructure Tbk John Scott Younger menambahkan, jika kondisi pasar dan rasio memadai, pembiayaan infrastruktur akan hadir dengan sendirinya.

"Tapi, kenyataannya, masalah saat ini adalah preparasi proyek buruk. Akibatnya, swasta tidak tertarik," kata John. Di sisi lain, pemerintah daerah pun tidak membantu menyiapkan proyek infrastruktur dengan baik. Kapasitas sumber daya manusia (SDM), kata John, juga harus dibenahi. Begitu juga dengan semerawutnya birokrasi yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur. "Kalau kita berhadapan dengan satu institusi, baru proyeknya bisa berjalan," ujar John.

■ ed: eh ismail